Standar Pembiayaan Sekolah: Komponen Utama, Efisiensi, dan Pengelolaan Sistem Pembiayaan Pendidikan

Andi Julianto¹, Muhammad Azriel Amin², Ryan Adhie³, Muchammad Ibnu Muzakir⁴

Universitas Darunnajah

* E-mail: andijulianto2702@gmail.com

Abstrak

Standar pembiayaan pendidikan berperan penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan. Penelitian ini mengkaji kemampuan kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan sekolah, seperti komponen utama dalam standar pembiayaan di lembaga pendidikan, bagaimana lembaga pendidikan memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien, dan bagaimana sistem pengelolaan pembiayaan sekolah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan kepala sekolah, serta staf administrasi sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menyoroti komponen utama pembiayaan, efisiensi pengelolaan dana, serta pengelolaan keuangan sekolah.

Kata kunci: Standar Pembiayaan Sekolah; Efisiensi; Pengelolaan Sistem Pembiayaan.

Abstract

The standard of education financing plays a crucial role in maintaining the quality and sustainability of the education system. This study examines the ability of school principals to manage school financing, including key components of financing standards in educational institutions, how these institutions ensure the effective and efficient use of funds, and how the school financing management system operates. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis, with school principals and administrative staff as research subjects. The findings highlight the main components of financing, fund management efficiency, and school financial management.

Keywords: School Financing Standards; Efficiency; Financial Management System.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan suatu bangsa, karena berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan merata, diperlukan sistem pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Standar pembiayaan pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap pesertadidik memperoleh layanan pendidikan yang layak, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Namun, dalam implementasinya,

masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama dalam pembiayaan pendidikan adalah ketimpangan alokasi dana antara daerah dan jenjang pendidikan. Banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran, sehingga berpengaruh pada kualitas sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, serta efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, pengelolaan dana pendidikan sering kali menghadapi kendala dalam aspek

transparansi dan akuntabilitas, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran serta ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana.

Kesenjangan dalam pembiayaan pendidikan juga berdampak pada akses pendidikan yang tidak merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan daerah tertinggal. Standar pembiayaan yang tidak diterapkan secara optimal dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, kajian mengenai standar pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar pembiayaan pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi sistem pembiayaan pendidikan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat guna memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang setara, bermutu, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai subjek penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan teknik semi- terstruktur, di mana peneliti menyusun daftar pertanyaan

terbuka tetapi tetap memberikan keleluasaan kepada partisipan untuk mengungkapkan pandangan mereka secara lebih luas. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam fenomena yang dikaji, dengan total lima informan kunci yang terdiri dari akademisi, praktisi, serta anggota masyarakat yang terdampak.

Penelitian ini akan memaparkan terhadap analisis jurnal ilmiah yang korelasi dengan pembahasan yang sudah dipilih. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik-topik tertentu yaitu tentang standar pembiayaan pendidikan. Lalu kemudian mengumpulkannya dengan mentabulasi dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Karena penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel. Berdasarkan dari berbagai sumber bacaan dan pengalaman penulis tentang topik tersebut, maka penulis mendeskripsikannya menjadi sebuah laporan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan hasil wawancara secara mendalam tentang persepsi kepala sekolah terhadap Pembiayaan sekolah. Peneliti mengambil beberapa pusat pembahasan. Seperti komponen utama dalam standar pembiayaan di lembaga pendidikan, Bagaimana lembaga pendidikan memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien, dan bagaimana sistem pengelolaan pembiayaan sekolah.

Dalam upaya ini memastikan bahwa keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan perlu memiliki sistem pembiayaan yang terstruktur dan transparan. Namun, terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji dalam pengelolaan standar pembiayaan di lembaga

pendidikan, seperti sumber pendanaan, alokasi anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan.

A. Pengertian Manajemen

Manajemen, dalam pengertian luas, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) terhadap sumber daya organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara itu, dalam arti sempit, manajemen sekolah atau madrasah mencakup perencanaan dan pelaksanaan program, kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, serta pengawasan, evaluasi, dan sistem informasi sekolah atau madrasah. Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai ilmu dan seni dalam mengelola pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Manajemen Pembiayaan Sekolah

Secara umum, manajemen pembiayaan sekolah mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Tahap awal dalam manajemen pembiayaan adalah perencanaan, yang merupakan proses rasional dan sistematis dalam menentukan langkah-langkah kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan terdapat unsur proses, kegiatan yang terstruktur, serta tujuan yang ingin dicapai. Sebagai suatu proses, perencanaan memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan secara mendadak. Perencanaan pembiayaan sekolah harus selaras dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek mencakup perencanaan untuk satu tahun, sementara pengembangan jangka panjang mencakup periode lima, sepuluh, hingga dua puluh lima tahun. Berdasarkan rencana

pengembangan sekolah tersebut, dibuatlah perencanaan pembiayaan yang mencakup jangka pendek maupun jangka panjang. Biaya pendidikan dapat diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran, baik dalam bentuk uang maupun non-uang, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam menunjang proses belajar mengajar, sehingga dalam penggunaannya harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini disebabkan oleh adanya standar peraturan yang mengatur pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan dana pendidikan harus dikelola secara efisien agar dapat memberikan manfaat optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mencapai tujuan yang diharapkan. (Vista & Sabandi, 2020)

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses pengelolaan keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di sekolah. Pembiayaan ini dipengaruhi oleh kondisi negara serta situasi di masing-masing sekolah. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sukses, sebagaimana terlihat dalam berbagai aspek pendidikan. Setiap keputusan terkait pembiayaan sekolah akan berdampak pada pendapatan yang diberikan maupun diterima. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan faktor tenaga kependidikan, biaya pendidikan, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Selain itu, pembiayaan sekolah bervariasi di setiap daerah, tergantung pada situasi dan kondisi setempat. Pendanaan sekolah ini berhubungan dengan aspek politik pendidikan, program pendanaan pemerintah, serta administrasi sekolah. (Aisyiah et al., 2020). Biaya pendidikan mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran dan kegiatan belajar siswa, seperti pembelian peralatan belajar, fasilitas pendidikan, biaya transportasi, serta gaji guru. Pengeluaran ini

dapat ditanggung oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sementara itu, biaya tidak langsung merujuk pada potensi pendapatan yang hilang (*earning forgone*) akibat waktu yang digunakan siswa untuk belajar, yang dikenal sebagai biaya peluang (*opportunity cost*). Biaya pendidikan mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran dan kegiatan belajar siswa, seperti pembelian peralatan belajar, fasilitas pendidikan, biaya transportasi, serta gaji guru. Pengeluaran ini dapat ditanggung oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sementara itu, biaya tidak langsung juga bisa merujuk pada potensi pendapatan yang hilang (*earning forgone*) akibat waktu yang digunakan siswa untuk belajar, yang dikenal sebagai biaya peluang (*opportunity cost*). (Jamaluddin Imron, n.d.)

C. Komponen Utama dalam Standar Pembiayaan di Lembaga Pendidikan

Pembiayaan sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya, anggaran dan pembiayaan sekolah mencakup pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (Safriadi, n.d.)

Bedasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, dalam sebuah lembaga pendidikan, standar pembiayaan merujuk pada sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan kegiatan sekolah. Sumber utama pembiayaan dalam lembaga pendidikan dapat berasal dari yayasan, pemerintah, serta kontribusi orang tua siswa.

Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan umumnya mendapatkan dana dari yayasan itu sendiri. Penganggaran pendidikan yang merupakan pembiayaan pendidikan dalam menunjang

jalannya proses pendidikan di sekolah membutuhkan pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan. (Mushtofa et al., 2022). Sementara itu, sekolah swasta biasanya membebankan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada orang tua siswa sebagai salah satu bentuk pendanaan. Dana SPP ini digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik serta mendukung berbagai kegiatan sekolah. Selain SPP, terdapat pula dana kegiatan yang dikumpulkan secara terpisah, biasanya diajukan di awal tahun ajaran melalui komite sekolah atau rapat wali murid.

Selain dana dari yayasan dan SPP, sekolah juga menerima bantuan dari pemerintah, yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diharapkan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar dapat menjadi solusi bagi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh sekolah. (Susanti et al., n.d.). Dana BOS ini dialokasikan untuk mendukung keperluan siswa dan operasional sekolah secara umum. Sebagai contoh, dalam sebuah sekolah dengan jumlah siswa sekitar 130 orang, dana BOS yang diterima dapat mencapai sekitar Rp250 juta, yang kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah. Dengan adanya berbagai sumber pendanaan ini, lembaga pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, memastikan proses belajar-mengajar berjalan lancar, serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan peserta didik secara berkelanjutan.

D. Penggunaan Dana Secara Efektif dan Efisien

Menurut kepala sekolah, penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam pembiayaan sekolah sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat mendukung kelancaran operasional sekolah, meningkatkan kualitas

pendidikan, serta memberikan manfaat langsung bagi siswa dan tenaga pendidik. Berikut beberapa pendekatan yang biasanya disarankan oleh kepala sekolah dalam penggunaan dana secara efektif dan efisien:

1. **Perencanaan Anggaran yang Detail**

Kepala sekolah perlu melakukan perencanaan anggaran yang komprehensif. Dengan perencanaan yang tepat, sekolah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk prioritas utama, seperti pembayaran honor tenaga pendidik, pengadaan bahan ajar, serta mendukung kegiatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan siswa.

2. **Prioritaskan Kebutuhan Utama**

Dana yang ada harus terlebih dahulu dialokasikan untuk kebutuhan yang mendesak dan penting, seperti pembayaran gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, dan pembelian alat pendidikan. Setelah itu, dana dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang mendukung kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru atau kegiatan ekstrakurikuler.

3. **Pengelolaan Dana yang Transparan**

Kepala sekolah harus memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam proses perencanaan serta pengawasan penggunaan dana akan membantumengurangi kesalahan pengelolaan dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan.

4. **Evaluasi dan Pengawasan Berkala**

Penggunaan dana perlu dievaluasi secara rutin. Kepala sekolah dapat melakukan evaluasi bulanan atau triwulanan untuk memastikan dana digunakan sesuai perencanaan dan tidak terjadi pemborosan. Pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran juga penting untuk menghindari penyalahgunaan dana.

5. **Mencari Sumber Dana Tambahan**

Selain dana dari yayasan, SPP, dan bantuan pemerintah seperti BOS, kepala sekolah dapat mencari sumber dana lain untuk mendukung pembiayaan sekolah. Misalnya, melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga pendidikan lain yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

6. **Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam pengadaan barang atau jasa, kepala sekolah perlu memastikan bahwa pembelian dilakukan dengan harga wajar dan sesuai kebutuhan. Proses tender atau meminta beberapa penawaran dari penyedia barang/jasa dapat membantu memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan.

7. **Pemanfaatan Teknologi**

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah dapat membantu mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan perangkat lunak untuk manajemen keuangan atau pembelajaran daring yang mengurangi biaya pengadaan materi ajar fisik.

E. **Pengelolaan Pembiayaan Sekolah**

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, meskipun sekolah tidak langsung menangani distribusi bantuan untuk siswa, kami tetap berperan untuk memastikan bantuan tersedia bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini, komite sekolah berperan sebagai pihak yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan sumber daya, fasilitas, dan anggaran yang diperlukan. Sekolah bekerja sama dengan komite untuk memberikan dukungan finansial kepada siswa yang kurang mampu, meskipun peran komite terbatas pada upaya pemberian bantuan finansial tersebut. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan donatur tetap yang setiap bulan memberikan bantuan untuk dua siswa. Kami juga aktif mencari sumber bantuan lain, salah satunya

melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang berhasil memberikan bantuan untuk empat siswa, dengan tiga di antaranya berhasil dicairkan dan digunakan.

Proses pemberian bantuan ini sering kali bergantung pada kondisi dan prestasi siswa. Meskipun tidak semua siswa yang membutuhkan dapat menerima bantuan, kami berusaha memberikan dukungan kepada mereka yang berprestasi. Misalnya, siswa yang meraih peringkat pertama bisa mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp500.000, sementara peringkat kedua menerima sekitar Rp300.000. Bantuan ini sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, meskipun jumlahnya terbatas.

Kesimpulan

Agar pembiayaan sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan anggaran yang detail, pengelolaan yang transparan, serta evaluasi dan pengawasan berkala. Kepala sekolah dan komite sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk prioritas utama, seperti peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan program pendidikan. Dalam praktiknya, pengelolaan pembiayaan sekolah juga harus mempertimbangkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan teknologi, serta inovasi dalam mencari sumber pendanaan tambahan. Selain itu, pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan harus dilakukan secara selektif dan berkeadilan agar mendukung peningkatan akses pendidikan bagi semua kalangan.

Dengan sistem pembiayaan yang terstruktur dan pengelolaan yang optimal, diharapkan lembaga pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih bermutu, merata, dan berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan

kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa terkendala faktor ekonomi.

Daftar Pustaka

Aisyiah, S., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar Pembiayaan di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2(2), 153–157. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2>.
1 21

Jamaluddin Imron, M. (n.d.). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH*.

PRINGSEWU Skripsi Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd) Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–76.

<https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.46>
994Safriadi, O., & MPd, Sp. (n.d.). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS SEKOLAH*.

Susanti, P., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (n.d.). *PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI SENDANGHARJO NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO Binti*

Azizaton Nafi'ah.
<https://doi.org/10.21009/JPD.XXX>

Tua, N., & Gaol, L. (n.d.). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*.
<https://www.researchgate.net/publicati>

o n/378286718

Vista, A., & Sabandi, A. (2020a). Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2(2), 170–175.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2>.
1 26

Vista, A., & Sabandi, A. (2020b). Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2(2), 170–175.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2>.
1 26